

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Brotodirejo, Soebroto. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung: Sesimpol, 1989.
- Djamin, Awaloedi. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: Kenyataan dan Harapan, 2014.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. West Group: S.T. PAUL, MINN, 1999.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Keliat, Makmur. *Reformasi Kepolisian Dalam TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik*. Jakarta: Program Magister Studi Pertahanan ITB dan Imparsial, 2008.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Lakbang Mediatama, 2007.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Bahasa Belanda*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 1977.

JURNAL

- Andri Susanto, "Masuknya Kepolisian Indonesia Dalam Struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1961-2002", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No. 3, (2013).

- Adrianus Adhiwira, dkk, "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif di Luar Institusi Polri di Tengah Isu Dwi-fungsi Polri", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 3, (2021).
- Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, (2011).
- Anwar, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia", *Jurnal Adabiya*, Vol. 20, No. 1, (2018).
- Ashabul Kahpi, "Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 2, (2017).
- Chairul Ridha dan Chandra Wijaya, "Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Fenomena Bottle-Neck Pamen Polri", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 16 No. 1, (2020).
- Fransisca Adelina, "Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 01, (2018).
- Hidayat Chusnul Chotimah, "Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara", *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 2, (2019).
- M. Asrul Azis, dkk, "Evaluasi Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Dalam Mewujudkan SDM Polri Yang Unggul", *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 24 No. 2, (2021).
- Mohammad Darry dan Diah Asri, "Problematika Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktiks dan Bisnis", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 8, No. 1, (2021).
- Muhammad Zulfikar dan Aminah, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2020).

Ronald Limanjaya dan Tatang Ruchimat, “Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan di Luar Kepolisian Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2, (2020).

Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan”, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, (2017).

Wahyudi, Ahmad, dkk, “Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisariss di Badan Usaha Milik Negara, Alauddin Law Development Journal, Vol. 5, No. 2, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisariss dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisariss dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Rencana Kerja Staff Sumber Daya Manusia Polri Tahun 2023." *Polri.go.id*, 2023.